

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Agro Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Jakarta | <input type="checkbox"/> Seputar Indonesia |
| <input type="checkbox"/> Bisnis Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Harapan |
| <input type="checkbox"/> Indo Pos | <input type="checkbox"/> Majalah Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Tani |
| <input checked="" type="checkbox"/> Investor Daily | <input type="checkbox"/> Media Indonesia | <input type="checkbox"/> Suara Karya |
| <input type="checkbox"/> Jurnal Nasional | <input type="checkbox"/> Pelita | <input type="checkbox"/> Suara Pembaruan |
| <input type="checkbox"/> Kompas | <input type="checkbox"/> Rakyat Merdeka | <input type="checkbox"/> The Jakarta Post |
| <input type="checkbox"/> Kontan | <input type="checkbox"/> Republika | |

SYL: Impor Opsi Paling Akhir Penuhi Kebutuhan Pangan

JAKARTA - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan bahwa Kementerian Pertanian (Kementan) tidak menolak impor pangan namun kebijakan impor bukanlah merupakan pilihan utama. Hal utama yang dikejar Kementan adalah produksi dalam negeri sehingga petani lebih sejahtera. "Saya tidak melarang impor tetapi impor itu opsi paling terakhir, kami juga tidak munafik jika kebutuhan dalam negeri melonjak dan produksi tidak mencukupi pasti akan impor juga," ujar Syahrul yang akrab disapa Mentan SYL kepada wartawan di Jakarta, Rabu (20/11).

Mentan SYL mengatakan, Indonesia harus tetap konsisten mewujudkan kedaulatan pangan agar masyarakat dan petani sejahtera. Kedaulatan pangan masuk dalam program prioritas utamanya hingga lima tahun ke depan

selain memperbaiki data pangan. Data pangan dan kedaulatan pangan merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, kedaulatan pangan akan terwujud jika data pangannya satu dan tidak bercabang-cabang. "Kedaulatan pangan juga akan terwujud jika produksi dalam negeri ditingkatkan dan impor menjadi opsi kedua," ungkap SYL.

Menurut SYL, pembangunan pertanian harus dilakukan secara menyeluruh dari Sabang sampai Merauke, sektor pertanian tidak bisa dilihat dari satu sisi atau sudut lain. Pembangunan pertanian itu cakupannya sangat luas dan dibutuhkan konsep yang komprehensif dan menyeluruh untuk mewujudkannya di semua wilayah. Karena itu, dukungan media juga sangat penting untuk mendukung sektor pertanian melalui pemberitaan yang positif dan tidak mengadu domba. "Saya tegaskan

bahwa kedaulatan pangan tanpa impor bukanlah sesuatu yang mustahil, tentunya dengan komitmen yang tinggi pasti akan terwujud," jelas dia. *P.7*

Terkait impor, Kementan sebagai pemerintah juga harus berkoordinasi dengan banyak pihak termasuk pengusaha dan petani karena semuanya satu kesatuan dan tidak boleh mengutamakan ego masing-masing. Banyak negara yang juga melakukan impor karena permintaan tinggi dan impor tidak dilarang tetapi hanya dijadikan alternatif kedua. "Indonesia juga akan menerapkan impor menjadi pilihan kedua dan Kementan akan terus menjaga kestabilan dan keamanan pangan. Prioritas utama Kementan adalah membuat petani berdaya saing dan mulai mengajarkan kemajuan teknologi kepada petani terutama dalam menggunakan alat-alat pertanian," jelas dia.

Sementara itu, Kementan melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) telah melakukan investigasi khusus terkait kemungkinan adanya telur ayam di Jawa Timur yang diduga tercemar residu partikel plastik. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan I Ketut Diarmita mengatakan, pihaknya menerima laporan dari para peneliti global advokasi kebijakan dan kesehatan lingkungan yang menyebut bahwa tiga telur ayam di Jawa Timur tercemar racun dioksin dan bahaya untuk dikonsumsi. "Kami sudah turunkan tim yang terdiri dari petugas Ditjen PKH dan unit pelaksana teknis Balai Pengujian Mutu Sertifikasi Produk Hewan dan mereka diberi tugas untuk memastikan keamanan pangan produk hewan khususnya telur ayam di Jawa Timur," kata Diarmita. *(dho)*

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Agro Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Jakarta | <input type="checkbox"/> Seputar Indonesia |
| <input type="checkbox"/> Bisnis Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Harapan |
| <input type="checkbox"/> Indo Pos | <input type="checkbox"/> Majalah Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Tani |
| <input type="checkbox"/> Investor Daily | <input checked="" type="checkbox"/> Media Indonesia | <input type="checkbox"/> Suara Karya |
| <input type="checkbox"/> Jurnal Nasional | <input type="checkbox"/> Pelita | <input type="checkbox"/> Suara Pembaruan |
| <input type="checkbox"/> Kompas | <input type="checkbox"/> Rakyat Merdeka | <input type="checkbox"/> The Jakarta Post |
| <input type="checkbox"/> Kontan | <input type="checkbox"/> Republika | |

TANGGAL 22 NOV 2019

HALAMAN 13 / 1

- RUBRIKASI**
- Berita
 - Berita Foto
 - Opini/Artikel
 - Tajuk
 - Pojok/Karikatur

Impor Beras Ketan Diprotes Petani

Presiden Joko Widodo telah memerintahkan jajaran kabinetnya untuk mengerem laju impor. Presiden pun mengancam akan 'menggigit' pihak-pihak yang berani berseberangan dengan perintahnya itu.

ANDHIKA PRASETYO

andhika@mediaindonesia.com

RENCANA impor beras ketan oleh Perum Bulog diprotes petani.

Ketua Asosiasi Lumbung Pangan Jawa Timur, Suharno, mengatakan rencana Bulog itu sama saja mau mematikan produk petani dalam negeri.

Ia menilai rencana impor beras ketan itu tidak masuk akal. Pasalnya, saat ini saja, ketika belum ada impor beras ketan, beras dan gabah di penggilingan padi sudah menumpuk dan tidak bisa dijual.

"Kalau impor jadi, ini akan menyebabkan gairah untuk bertani menjadi loyo, petani tidak akan semangat, sedangkan impor yang lama saja masih memengaruhi distribusi beras saat ini," ujar Suharno, kemarin.

Pemerintah, kata dia, seharusnya menjaga stabilitas harga. Jika impor beras ketan tetap dilakukan, itu sama saja menjatuhkan harga produk petani dalam negeri.

"Harusnya petani ditingkatkan lagi untuk bertanam (beras ketan) daripada impor. Konsep itu yang harus diwujudkan untuk swasembada pangan," kata Suharno.

Kritik yang sama disampaikan Direktur Eksekutif Center for Budget

Analysis (CBA) Uchok 'Sky' Khadafi. Ia melihat rencana impor Bulog itu telah bertolak belakang dengan perintah Presiden Joko Widodo kepada jajaran kabinetnya untuk mengerem impor.

"Kalau dilakukan impor beras ketan, berani sekali Bulog atau Kemendag. Itu sudah melanggar perintah Presiden Jokowi dan hanya menghabiskan devisa," ujar Uchok.

Perintah itu disampaikan Presiden saat memberi sambutan dalam penutupan Kongres Partai NasDem di Ji Expo Kemayoran, Jakarta, Senin (11/11) lalu.

"Saya sampaikan, saya tidak mau impor-impor terus. Saya sampaikan ini di mana-mana, di dalam rapat internal juga," kata Jokowi.

"Jangan ada yang coba-coba menghalangi saya dalam menyelesaikan masalah yang tadi. Saya sampaikan, pasti saya akan gigit, dengan cara saya," tegasnya saat itu.

Karena itu, kata Uchok, langkah Perum Bulog mengimpor beras ketan akan berseberangan dengan perintah Presiden itu karena hanya akan menambah defisit neraca perdagangan. **M-13**

Ia melanjutkan, anggaran pembelian ketan impor itu lebih baik diberikan kepada petani untuk menjadi subsidi penanaman padi ketan.

"Kalau subsidi petani, itu bisa

bikin sejahtera petani kita. Pasokan dalam negeri pun cukup. Akan tetapi, kalau impor ketan, Bulog hanya bisa sejahterakan petani negara lain dong," sindirnya.

Produksi kurang

Dalam kesempatan terpisah, Perum Bulog mengaku telah mengajukan izin impor beras ketan sebanyak 65 ribu ton.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan langkah itu diambil karena para petani Tanah Air belum mampu menghasilkan komoditas tersebut dalam jumlah yang mencukupi.

"Ada yang membutuhkan beras ketan, tapi kita belum produksi banyak. Sekarang kami baru ajukan. Itu bukan berarti kami mengacau kalau minta. Memang produksi yang belum ada," ujar Budi di Jakarta, kemarin.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh menambahkan, terakhir kali pihaknya mengimpor beras ketan ialah pada masa Orde Baru.

"Pernah ada impor beras ketan, tapi itu waktu Orde Baru. Itu sudah puluhan tahun lalu," tuturnya.

Sebelumnya, Sekretaris Perum Bulog Awaludin Iqbal membenarkan ada permohonan impor beras ketan sebanyak 65 ribu ton dari Bulog ke Kementerian Perdagangan.

Ia mengatakan permintaan impor dari Vietnam dan Thailand tersebut karena ada kebutuhan di dalam negeri yang tidak terpenuhi oleh petani di dalam negeri. (E-2)

Bulog Minta Tambah Anggaran Serap Beras

● DEDY DARMAWAN NASUTION

Target pengadaan beras pada 2020 diturunkan jadi 1,6 juta ton.

JAKARTA — Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso meminta pemerintah menambah anggaran pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) menjadi Rp 20 triliun. Sebab, saat ini pemerintah hanya menganggarkan dana sekitar Rp 2,5 triliun per tahun untuk bisa mengadakan beras sebanyak 1,2 juta-1,4 juta ton.

"Kami mengusulkan pemberian modal kerja untuk pengadaan CBP paling tidak Rp 20 triliun," kata Budi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/11).

Sesuai dengan skema pengadaan CBP yang diterapkan saat ini, pemerintah hanya membayar selisih harga antara harga beli beras oleh Bulog dan harga jual beras yang digunakan untuk operasi pasar.

Sebagai contoh, jika Bulog membeli beras dari petani seharga Rp 10 ribu per kg, tapi menjualnya sebesar Rp 8.000 per kg dalam operasi pasar,

pemerintah akan membayar selisih harga sebesar Rp 2.000 per kg. Lewat usulan sebesar Rp 20 triliun itu, Buwas menginginkan agar seluruh kebutuhan untuk pengadaan CBP ditanggung pemerintah. Dengan kata lain, tidak lagi dengan hanya membayar biaya selisih karena merugikan Bulog.

Saat ini, pasar beras Bulog menyempit sejak peralihan program Beras Sejahtera (Rastra) menjadi Ban-

tuang Pangan Nontunai (BPNT). Rastra mewajibkan para penerima bantuan menggunakan beras Bulog, sementara BPNT menerapkan sistem pasar bebas.

Selain itu, Budi mengatakan, anggaran yang digunakan Bulog untuk melakukan pengadaan adalah pinjaman perbankan dengan bunga komersial. Pinjaman perusahaan pun membengkak karena Bulog tetap harus melakukan pengadaan, meski penjualan sulit dilakukan.

Menurut Budi, jika pemerintah bisa menanggung seluruh kebutuhan anggaran untuk pengadaan CBP, Bulog bisa terhindar dari kredit perbankan dan terlilit bunga. "Dengan begitu, kita bisa melakukan pengadaan CBP tanpa harus meminjam ke bank yang ada bunganya," ujar dia.

Perum Bulog juga menurunkan target pengadaan beras pada 2020 menjadi 1,6 juta ton. Tahun ini, target penyerapan mencapai 1,8 juta ton, tapi realisasi baru mencapai 1,14 juta ton atau sekitar 63,6 persen dari angka target. Perusahaan menilai, perlu adanya penyesuaian target sesuai dengan pasar beras Bulog.

Budi mengatakan, penurunan target memang sangat memungkinkan. Namun, ia masih melihat situasi riil ke depan dalam melakukan penyerapan, sehingga penambahan target masih dimungkinkan.

"Target kita memang bisa jadi turun. Tapi, kita lihat dulu kondisinya, yang penting kita bisa dapatkan dulu hilir (pasar) beras Bulog," kata Budi.

Ia mengemukakan, dengan target pengadaan sebesar 1,6 juta ton, penyaluran diharapkan bisa mencapai 1,57 juta ton. Penyaluran tersebut terdiri dari distribusi CBP untuk bencana alam sebanyak 15 ribu ton, ban-

tuang internasional 12 ribu ton, distribusi daerah 58,3 ribu ton, serta untuk operasi pasar 1,48 juta ton.


Adapun persediaan beras pada awal 2020 nanti diperkirakan sebesar 1,3 juta ton dari posisi stok akhir tahun ini sebanyak 2,2 juta ton. Penurunan 900 ribu ton itu diperkirakan

Budi bisa terjadi jika pada akhir tahun ini kebutuhan beras meningkat dan harus dipenuhi lewat operasi pasar Bulog.

Pengamat pertanian dari Ahli Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menyarankan pemerintah segera melakukan penyesuaian harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015. Khudori menilai, HPP saat ini sudah tidak relevan dan menyulitkan Bulog untuk melakukan penyerapan gabah petani.

"Sudah tidak relevan jika Bulog saat ini harus menggunakan instrumen itu," kata dia.

Menurut Khudori, pemerintah belum menaikkan HPP dengan alasan dapat menyebabkan kenaikan harga beras di hilir. Kenaikan itu dapat berdampak langsung terhadap peningkatan laju inflasi nasional dan melemahkan daya beli masyarakat miskin.

Namun, kata dia, pemerintah tak perlu khawatir dengan potensi kenaikan inflasi. Sebab, pemerintah sudah memiliki berbagai instrumen bantuan pangan untuk masyarakat miskin. 

■ ed: ahmad fikri noor

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Agro Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Jakarta | <input type="checkbox"/> Seputar Indonesia |
| <input type="checkbox"/> Bisnis Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Harapan |
| <input type="checkbox"/> Indo Pos | <input type="checkbox"/> Majalah Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Tani |
| <input type="checkbox"/> Investor Daily | <input type="checkbox"/> Media Indonesia | <input type="checkbox"/> Suara Karya |
| <input type="checkbox"/> Jurnal Nasional | <input type="checkbox"/> Pelita | <input type="checkbox"/> Suara Pembaruan |
| <input type="checkbox"/> Kompas | <input type="checkbox"/> Rakyat Merdeka | <input type="checkbox"/> The Jakarta Post |
| <input type="checkbox"/> Kontan | <input type="checkbox"/> Republika | |

- TANGGAL** 23 / 1
- HALAMAN**
- RUBRIKASI** Berita
 Berita Foto
 Opini/Artikel
 Tajuk
 Pojok/Karikatur

► **PENGADAAN CADANGAN BERAS**

Bulog Minta Bantuan Modal

Bisnis, JAKARTA — BUMN Pangan Perum Bulog berencana meminta bantuan modal awal senilai Rp20 triliun dari pemerintah untuk pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) 2020 demi menekan jumlah utang dan menopang operasional perusahaan.

*Ilim Fathimah Timorria
redaksi@bisnis.com*

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan bahwa sejauh ini, perusahaan pelat merah tersebut menjalankan tugas pengadaan beras dengan mengandalkan dana pinjaman dari lembaga keuangan.

"Kami mengusulkan pemberian modal kerja untuk pengadaan CBP, karena selama ini, kami menggunakan dana pinjaman dari perbankan untuk pengadaan beras CBP. Modal yang kami usulkan sebesar Rp20 triliun," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (21/11).

Budi mengemukakan penyertaan modal tersebut diperlukan Bulog agar perusahaan tak perlu melakukan pinjaman kredit dengan bunga berjalan dari perbankan. Menurutnya, utang Bulog sampai akhir 2018 telah mencapai Rp28 triliun dan berpotensi bertambah seiring dengan bunga yang

► **Realisasi pengadaan beras dalam negeri oleh Perum Bulog sampai 18 November 2019 tercatat baru mencapai 1,14 juta ton atau 63,6% dari target awal tahun.**

► **Bulog masih menyimpan sekitar 900.000 ton beras hasil impor berstatus CBP yang tidak bisa dilepas ke pasar komersial tanpa penugasan.**

terus berjalan dan pengadaan yang tetap berlangsung.

Adapun, Bulog menargetkan dapat menyerap 1,6 juta ton beras pada 2020 mendatang. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan target pengadaan pada 2019 yang dipatok di angka 1,8 juta ton.

Budi mengemukakan target serapan ini dibuat dengan asumsi stok awal pada Januari 2020 berjumlah 1,3 juta ton. Di sisi lain, stok beras yang dimiliki Bulog per 18 November masih berjumlah 2,24 juta ton.

Dia menyatakan pihaknya pun terbuka pada opsi revisi target dengan mempertimbangkan realisasi penyaluran mengingat pihaknya pun mempertimbangkan beban penyimpanan stok beras di gudang.

Adapun, realisasi pengadaan beras dalam negeri oleh Perum Bulog sampai 18 November 2019 tercatat baru mencapai 1,14 juta ton atau 63,6% dari target awal tahun yang dipatok di angka 1,8 juta ton.

Beban utang perusahaan yang terus bertambah seiring sulitnya realisasi penyaluran menjadi kendala utama rendahnya serapan. *Bi-23*

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.02/2019 tentang Penyediaan, Pencairan dan Peranggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah, pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp2,5 triliun yang dibayarkan kepada Bulog dengan mekanisme pola penggantian

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Agro Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Jakarta | <input type="checkbox"/> Seputar Indonesia |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bisnis Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Harapan |
| <input type="checkbox"/> Indo Pos | <input type="checkbox"/> Majalah Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Tani |
| <input type="checkbox"/> Investor Daily | <input type="checkbox"/> Media Indonesia | <input type="checkbox"/> Suara Karya |
| <input type="checkbox"/> Jurnal Nasional | <input type="checkbox"/> Pelita | <input type="checkbox"/> Suara Pembaruan |
| <input type="checkbox"/> Kompas | <input type="checkbox"/> Rakyat Merdeka | <input type="checkbox"/> The Jakarta Post |
| <input type="checkbox"/> Kontan | <input type="checkbox"/> Republika | |

TANGGAL 23 /
HALAMAN 23 /
RUBRIKASI Berita
 Berita Foto
 Opini/Arti
 Tautik
 ...ur

selisih antara harga jual oleh Bulog dan harga pembelian pemerintah.

Harga Pembelian Beras (HPB) yang dipatok pemerintah untuk Bulog sendiri berada di angka Rp9.583 per kilogram, harga tersebut tak berubah dengan HPB pada 2018. Di sisi lain, harga beras yang dilepas Bulog dalam rangka penugasan berkisar di angka Rp8.000 per kilogram.

Dengan asumsi harga beras Rp10.000 per kilogram, Budi menyebutkan anggaran sebesar Rp2,5 triliun tersebut hanya setara dengan CBP sebanyak 250.000 ton.

Di sisi lain, Pasal 9 Ayat (2) menyebutkan penggantian penggunaan dana CBP dapat diajukan oleh Perum Bulog kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (KPA BUN) setiap 3 bulan setelah melalui peninjauan oleh setiap kementerian yang bertanggung jawab dalam kebijakan penggunaan CBP.

Dia pun mengaku kondisi ini berat bagi keuangan perusahaan mengingat sarana penyaluran kini terbatas.

PERFORMA NEGATIF

Dalam paparannya, Budi pun menyebutkan segmen *public service obligation* (PSO) alias penugasan terus menunjukkan performa yang negatif.

“Mekanisme perubahan arah kebijakan dari Beras Sejahtera [Rastra] menjadi Bantuan Pangan Non Tunai [BPNT] berpengaruh terhadap kinerja keuangan PSO Perum Bulog sejak 2015 sampai 2018. Segmen PSO terus menyebabkan penurunan pendapatan sampai triwulan III. Segmen PSO mengalami rugi sebesar Rp955 miliar,” imbuh Budi.

Di samping kondisi di atas, Budi pun menyebutkan saat ini Bulog masih menyimpan sekitar 900.000 ton beras hasil impor berstatus CBP yang tidak bisa dilepas ke pasar komersial tanpa penugasan.

Pelepasan beras impor tersebut pun diakuinya sulit mengingat kualitasnya yang tak sesuai selera pasar. Dia menyatakan pihaknya harus mencampur beras eks-impor dengan beras lokal untuk dapat dilepas melalui skema PSO.

Per 18 November 2019, realisasi penyaluran cadangan CBP untuk ketersediaan pangan dan stabilisasi harga (KSPH) tercatat berjumlah 453.702 ton.

Adapun, untuk Bansos Rastra yang dihentikan pada Mei 2019 lalu, Bulog telah menyalurkan sebanyak 351.848 ton, lebih rendah dari realisasi pada 2018 yang mencapai 1,2 juta ton.

Di sisi lain, target penyaluran melalui Bantuan Pangan Non-Tunai sebanyak 700.000 ton selama September—Desember pun disebut Buwas baru mencapai 85.000 ton.

Pimpinan Komisi IV DPR Sudin setuju bahwa pemerintah perlu memberi modal kerja kepada Perum Bulog sesuai dengan tata kerja. “Perlu diberikan modal sesuai dengan kesepakatan pemerintah dengan Perum Bulog, tapi untuk kisarannya, kami tidak punya hak untuk menentukan,” katanya.

Sudin juga akan mendorong pemerintah untuk segera membentuk Badan Pangan Nasional (BPN), sebagai pendukung kinerja Perum Bulog.

“Sesuai dengan Undang-Undang Pangan No. 12 tentang Pangan perlu dibentuk Badan Pangan Nasional, dan menunjuk Perum Bulog sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan penugasan di bidang pangan,” pungkasnya.

Dihubungi terpisah, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mengemukakan bahwa perusahaan pelat merah ter-

Target Lebih Rendah

Perum Bulog menargetkan dapat menyerap 1,6 juta ton beras pada 2020 mendatang. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan target pengadaan pada 2019 yang dipatok di angka 1,8 juta ton.

Asumsi Perhitungan Rencana Pengelolaan Beras Perum Bulog 2020

▶ Persediaan Awal:	1,3 juta ton
▶ Pengadaan Dalam Negeri :	1,6 juta ton
▶ Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah:	1,57 juta ton
• Bencana Alam	15.000 ton
• Bantuan Internasional	12.000 ton
• Daerah	58.300 ton
• Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga	1.485.000 ton
▶ Persediaan Akhir :	1,35 juta ton

Sumber : Perum Bulog BISNIS/RADITYO EKO

sebut memang tercatat belum bisa merealisasikan target serapan dalam beberapa tahun terakhir.

Kendati demikian, Dwi menyebutkan hal tersebut bukanlah murni kesalahan Bulog tetapi turut dipengaruhi oleh aturan yang mengatur harga pembelian beras oleh pemerintah.

“Memang harapan kita serapan Bulog dapat terus bertambah, tetapi target yang tak tercapai bukan murni kesalahan Bulog. Bulog terikat pada Inpres yang mengatur harga pembelian pemerintah [HPP],” ujarnya saat dihubungi *Bisnis*, Kamis (21/11).

Dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2015, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani dipatok di level Rp3.700 per kilogram dengan fleksibilitas sebesar 10%. Dwi berpendapat harga tersebut sudah tak sesuai dengan kondisi di lapangan.

“HPP beras dan gabah itu tidak masuk akal. Kalau direlaksasi 10% menjadi Rp4.070 pun tidak mungkin. Di situ letak kesulitan Bulog menyerap sesuai target,” papar Dwi. (m01)